

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis* Jakarta: Prenada Media
- Amir, Ari Yusuf. 2020. *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*. Cetakan I. Jogjakarta: Arruza Media
- Arief Amrullah. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Prenada Media Group
- Amiruddin, Dan H. Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Budiyono, Tri Budiyono. 2011. *Hukum Perusahaan. Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Salatiga: Griya Media
- Bryan A Gamer dalam Syahrul Machmud, 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan. Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Christiawa, Rio. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Effendi, A'an Dan Dyah Ochtorina Susanti. 2021. *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Cetakan Pertama Surabaya: PT. Bina Ilmu

- Kepailitan Dan PKPU. 2017. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi revisi, Jakarta: PT. Tatanusa
- Mangesti, Yovita A. & Bernard L. 2014. *Tanya, Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Magabloh, Naya. 2006. *Banking and Financing*, Washington DC: Beardbooks Publishing
- Muljadi, Kartini. 2001. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya Dalam Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rato, Dominikus. 2014. *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Untuk Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. Cetakan IV. Surabaya: LaksBang Justitia
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- . 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- . 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening juncto*, Jakarta: Grafiti
- Simpson, Sally S. 1993. "Strategy, Structure and Corporate Crime," *4 Advances in Criminological Theory*.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ketiga belas. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerodjo, Irawan. 2021. *Hukum Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) (Joint Operation/J.O)*. Cetakan I. Yogyakarta: LaksBang Justitia
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan*. Edisi 2. Medan: PT. Sofmedia
- Subhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Tanya, Bernard L, dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publisng

Tim Redaksi Tatanusa. 2017. *Kepailitan dan PKPU Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Edisi Revisi. Jakarta: Tatanusa

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato),

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ,

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.

### **Jurnal / Kamus / Artikel / Skripsi**

Atmarazagi, Fajrul Umam. (2016). Pembuktian Itikad Baik Debitor Dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/4153>

Bebby S, Lousia Ester. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Kasus Kepailitan Perusahaan/KKKS Minyak dan Gas Bumi Studi Kasus Kepailitan Antara PT. Global Pacific Energi Dengan KKKS PT. Golden Spike Energy Indonesia. *Jurnal hukum to-ra*, Volume 6 No.1, Halaman 13-32, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

Ginting, Vida Rianita. (2015). Analisis Terhadap Penolakan Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Oleh Kreditor Separatis

- Dalam Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Perdamaian PT. Maja Agung Latexindo dan PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan). Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St, Paul, Minnesota 1990, ed.6
- Ishak. (2016). Perdamaian Antara Debitur Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Vol. 18, No. 1.
- Immanuel Rivanda Sibagariang. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 20/PDT.SUS-PKPU/2018/PN. Medan Dan No. 21/PDT.SUS-PKPU/2018/PN. Medan, Jurnal Darma Agung Volume 29, Nomor 1.
- Kerthapatrika, Novitasari. (2017). Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terdapat Debitor, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika>
- Judith van Erp, (2018). *The Organization of Coporate Crime: Introduction to Special Issue of Administrative Science*, Administrative Science Journal, Volume 8 No.3
- Jobby, Parulian, Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Pembentukan Badan Usaha Baru sebagai Restrukturisasi Utang (Analisis Yuridis Putusan No. 21 Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst), Depok ; Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Kampus UI.
- Kornelis, Yudi. (2016). Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia. Jurnal Selat, Volume. 4 Nomor. 1.
- Leo, Rado Fridsel, Novitasari. (2020). Kedudukan Hukum Kreditur Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang-Undang Kepailitan. Jurnal hukum to-ra, Volume 6 No.3, Halaman 250-264, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
- LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).

- Mardjono Reksodiputro (2004) *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama dalam Bentuk Baru*”, dalam Jurnal Hukum Internasional, Volume I Nomor 4 Juli 2004
- Maruly Agustinus Sinaga. (2020). Analisis Yuridis Pailit Akibat Ditolaknya Rencana Perdamaian Dalam PKPU (Studi Kasus Putusan No 6/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN-Niaga Mdn. Tersedia dari repositori.usu.ac.id /bitstream/handle/123456789/25841/160200022
- One Ariyanto. (2017). Analisis Yuridis Putusan PKPU Yang Dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Terhadap Permohonan Pailit Oleh Debitor (Studi Putusan MA Nomor 48/PDT.Sus.Pailit/2014). Tersedia dari jurnal ilmiah eprints.unram.ac.id/9864/1
- Rudyat, Charlie *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Jakarta: Pustaka Mahardika Jakarta
- Simanjuntak, Jimmy. (2017). Pelaksanaan Kewenangan Penahanan Terhadap Debitor Pailit Menurut UU RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Jurnal hukum to-ra, Volume 3 No. 2, Halaman 0, <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1156>